

2.1.1 Penjaminan Mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) dokumen mutu: kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah pelaksanaan Audit Penjaminan Mutu (AMI); dan (5) pelaksanaan *external benchmarking* peningkatan mutu.

1. Dokumen Legal

- a) Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Mutu, dan Unit Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang berdasarkan keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor: 015/SK//Univ-PGRI/2011 tentang pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Mutu, dan Unit Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.
- b) Pedoman Tata Pamong, yang sah dan dilegalkan di lingkungan Universitas PGRI Palembang melalui SK Rektor No 197/R.A.49/Univ-PGRI/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- c) Peraturan YPLP-PT PGRI SumSel No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018 tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.
- d) Surat Keputusan Dekan Nomor: 238/E.49/FKIP/Univ-PGRI/2014 Tentang Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

2. Dokumen Mutu

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam surat keputusan senat FKIP No. 112/C.2/Senat.FKIP/Univ. PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Manual Mutu Pendidikan, Manual Mutu Penelitian, Manual Mutu PKM, dan Manual Mutu Tata Kola dan Kemahasiswaan), Standar Mutu (8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, 8 Standar Mutu PKM, 7 Standar Mutu Tata Kelola dan Mahasiswa) dan Formulir Mutu.

3. Terlaksananya siklus PPEPP

FKIP melalui Gugus Penjamin Mutu secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen melalui hasil survey kepuasan, mahasiswa, dosen dan penunjang akademik dalam rekam jejak Dosen dalam Tridharma PT yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Pedoman Monev Tridharma PT Universitas PGRI Palembang. Rekam jejak kinerja dosen diperoleh melalui laporan hasil Beban Kerja Dosen (BKD).

Hasil pelaksanaan dianalisis setiap semester dan dijadikan tindak lanjut untuk perbaikan berikutnya. Kinerja tenaga kependidikan dimonitor berdasarkan tugas pokok dan fungsi sehingga setiap tenaga kependidikan dapat mengevaluasi dirinya apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas tersebut diatur dalam peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang melalui SK Rektor No 197/R.A.49/ Univ-PGRI/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang. Rekam jejak kinerja tenaga kependidikan diperoleh dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3). Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FKIP Universitas PGRI Palembang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan survei visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh 12 program studian FKIP Universitas PGRI Palembang disahkan melalui SK Dekan No: 221/C.2/FKIP/Univ.PGRI/2016.

4. Bukti Sahih Audit Mutu Internal

Bukti sah dokumentasi keterlaksanaan pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk surat tugas monitoring, lembar kerja monitoring, laporan hasil evaluasi, dan laporan Audit Mutu Internal (AMI).

5. Pelaksanaan *external benchmarking*

External Benchmarking UPPS dalam pelaksanaan SPMI adalah [Badan Penjamin Mutu \(BPM\) Universitas Negeri Semarang melalui program Asuh Perguruan Tinggi Unggul sejak tahun 2018](#). Selain itu, stakeholders dengan melalui umpan balik mutu lulusan. Untuk selanjutnya hasil evaluasi yang didapat secara internal dan eksternal dan penjangkaran umpan balik disusun kemudian ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan menyusun perencanaan perbaikan mutu yang akan datang baik dalam pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat maupun dalam pelayanan bidang administrasi. Hasil dari adanya system penjaminan mutu yang terstruktur adalah meningkatnya kualitas pengelolaan PSMPJ, tertibnya administrasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi, dan meningkatnya kualitas pembelajaran.

2.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap (1) kebijakan dan (2) implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan

mutu di UPPS. Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan penjaminan mutu. Evaluasi dilakukan berkala dengan menggunakan metode survei. Instrumen yang digunakan telah divalidasi sehingga mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel dan layak untuk digunakan sebagai alat pengukuran capaian kinerja. Pengolahan dan analisis data survey menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selain survei, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian setiap indikator menggunakan analisis pohon masalah dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi akar masalah. Setelah hasil identifikasi didapatkan maka akan dilakukan perbaikan dan pengembangan guna mencapai hasil yang diinginkan. Hasil evaluasi capaian dibuatkan dalam bentuk laporan hasil dan dipublikasikan sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Aspek yang diukur	Kelebihan	Kelemahan
1	Kebijakan	Adanya peraturan yang mendukung mengenai pelaksanaan penjaminan mutu di PSMPJ	Perlu kebijakan yang mendeteskikan tugas penjaminan mutu secara lebih operasional
2	Implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS	Implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penjaminan mutu program studi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengikuti pelaksanaan prosedur mutu yang telah ditentukan oleh gugus penjamin mutu fakultas dan Lembaga Penjamin Mutu Universitas.	-

2.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan (1) kualitas kebijakan dan (2) keefektifan implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PSMPJ yaitu :

No	Aspek yang diukur	Evaluasi	Tindak Lanjut
1	Kebijakan	Adanya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor	Adanya penguatan terhadap pemahaman pengelola PSMPJ dan tenaga pendidikan yang dilakukan dengan kegiatan temu forum, temu rapat, temu kolegal dalam rangka mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu.
2	Implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS	Implementasi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS sudah berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. 1. UPPS telah memiliki Gugus Penjamin mutu (GMP) tingkat fakultas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) tingkat program studi 2. UPPS melaksanakan kegiatan praktik PPEPP 3. Adanya bukti sah pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik 4. Pelaksanaan <i>external benchmarking</i> dalam penjaminan mutu 5. Pengkoordinasian GPM dan UPM ke Badan Penjaminan Mutu (BPM) universitas pada pelaksanaan SPMI telah berjalan dengan baik sebagai upaya penguatan SPMI	1. Penguatan koordinasi BPM, GPM, dan UPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu bagi pada tingkat PS hingga UPPS 2. Penguatan <i>external benchmarking</i> dalam rangka upaya optimalisasi sistem penjaminan mutu